

LAPORAN TESIS

**PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA
KANKER LEHER RAHIM DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASCA PEMBATASAN
FORMULARIUM NASIONAL**

TESIS



dr. Stefanus Hengkie Marseno, Sp.OT

Nim 22.C2.0079

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

LAPORAN TESIS

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA KANKER LEHER RAHIM DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASCA PEMBATASAN FORMULARIUM NASIONAL

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Hukum Kesehatan



dr.Stefanus Hengkie Marseno, Sp.OT

Nim 22.C2.0079

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Kebijakan kementerian kesehatan dalam memberikan pelayanan pengobatan kanker dilakukan dengan menetapkan kebijakan Fornas, tetapi kebijakan ini dapat menghambat akses pasien kanker terhadap perawatan medis yang sesuai, sehingga berpotensi mempengaruhi penyembuhan dan meningkatkan angka kematian akibat kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim pasca pembatasan formularium nasional dan pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder, serta tiga jenis bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim setelah pembatasan formularium nasional bertentangan dengan Asas *lex superior derogate lex inferior*. Kebijakan Fornas, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/200/2020 dan HK.01.07/MENKES/2197/2023, tidak memenuhi hak pelayanan kesehatan yang memadai karena penghapusan obat kanker Bevacizumab, yang membatasi pilihan pengobatan dan berpotensi mempengaruhi kualitas hidup pasien. Kemudian, pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim di Rumah Sakit Umum Daerah mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pemerintah, pengelolaan BPJS Kesehatan, dan praktik medis di lapangan. Meskipun tujuan utama Formularium Nasional adalah menjamin akses terhadap obat-obatan yang aman, terjangkau, dan efektif, penghapusan beberapa obat vital dari daftar menimbulkan tantangan serius. Hal ini membatasi pilihan pengobatan yang tersedia bagi pasien, berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan hasil pengobatan mereka. Selain itu, lambatnya revisi dalam menambah obat-obatan dan terapi baru ke dalam Fornas semakin memperlihatkan rendahnya efektivitas hukum dalam implementasi aturan ini. Keterlambatan ini tidak hanya memperpanjang periode ketidakpastian bagi pasien, tetapi juga menurunkan kemampuan sistem kesehatan untuk responsif terhadap perkembangan ilmu medis dan kebutuhan pasien yang terus berubah.

Penelitian ini merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk merevisi kebijakan Fornas dan memasukkan kembali obat Bevacizumab. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah diharapkan meningkatkan program edukasi bagi pasien kanker leher rahim tentang hak-hak kesehatan mereka, informasi obat, dan alternatif pengobatan.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Kesehatan, Kanker Leher Rahim, Pembatasan Formularium Nasional.

ABSTRACT

The Ministry of Health's policy on cancer treatment services is implemented through the National Formulary (Fornas) policy, yet this policy may hinder cancer patients' access to appropriate medical care, potentially affecting recovery and increasing cancer mortality rates. This study aims to examine the fulfillment of the right to health for cervical cancer patients following the National Formulary restrictions and its implementation at Regional Public Hospitals.

This research employs a sociological juridical method with a descriptive-analytical approach. Research data includes primary and secondary data, as well as three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings are then analyzed qualitatively.

*The findings show that regulations on fulfilling the right to health for cervical cancer patients after the National Formulary restrictions conflict with the principle of *lex superior derogate lex inferior*. The Fornas policy, based on Minister of Health Decrees No. HK.01.07/MENKES/200/2020 and No. HK.01.07/MENKES/2197/2023, does not adequately fulfill the right to healthcare due to the removal of the cancer drug Bevacizumab, which limits treatment options and potentially impacts patients' quality of life. Furthermore, the fulfillment of healthcare rights for cervical cancer patients at Regional Public Hospitals reflects the complex relationship between government policy, BPJS Health management, and medical practice. Although the primary goal of the National Formulary is to ensure safe, affordable, and effective access to medications, the removal of several vital drugs presents significant challenges. This restricts treatment options available to patients, potentially affecting their quality of life and treatment outcomes. Additionally, the slow revision process for adding new drugs and therapies to the Fornas highlights the low effectiveness of law enforcement in implementing this regulation. This delay not only prolongs the period of uncertainty for patients but also reduces the healthcare system's responsiveness to medical advancements and evolving patient needs.*

The study recommends that the Ministry of Health revise the Fornas policy to include Bevacizumab. Additionally, it encourages Regional Public Hospitals to enhance educational programs for cervical cancer patients regarding their health rights, medication information, and alternative treatments.

Keywords: *Fulfillment, Right to Health, Cervical Cancer, National Formulary Restriction.*